



Kebakaran Mengintai Yogyakarta

- Kondisi Perkotaan Semakin Padat
- BPBD Siapkan Rancangan Perda

YOGYA, TRIBUN - Kondisi Kota Yogyakarta sudah semakin sesak oleh permukiman dan bangunan-bangunan.

AWAS KEBAKARAN

- ▶ Kondisi Kota Yogyakarta semakin padat
- ▶ Dipicu menjamurnya bangunan dan permukiman
- ▶ Kondisi itu meningkatkan kerentanan kota terhadap kebakaran
- ▶ Pemkot menggagas Raperda tentang kebakaran untuk antisipasi
- ▶ BPBD mengusulkan rancangan Perda dibahas tahun ini
- ▶ Dalam Raperda akan diatur lebih rinci soal kewenangan penanggulangan kebakaran

Dampaknya, bencana kebakaran semakin mengintai kota ini. Mengantisipasi bencana kebakaran di Kota Yogyakarta Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kebakaran.

Nantinya dalam Raperda tersebut akan diatur soal kewenangan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Menurut Kepala BPBD

Kota Yogyakarta, Agus Winarto Raperda tersebut sudah sangat diperlukan. Menurut dia mengingat saat ini kondisi di Kota Yogyakarta sudah semakin penuh sesak dengan permukiman dan bangunan-bangunan.

"Di masa yang akan datang, kebakaran bisa menjadi salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi kota

■ Bersambung ke Hal 14

| Nilai Berita | Sifat | Tindak La |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat Segera | <input type="checkbox"/> Untuk Ditar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Positif | <input type="checkbox"/> Segera | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Dike |
| <input type="checkbox"/> Netral | <input checked="" type="checkbox"/> Biasa | <input type="checkbox"/> Jumpa Per |

Kebakaran Mengintai

Sambungan Hal 13

ini. Saat ini kami sedang menyusun bahannya," kata Agus, Rabu (7/5).

Kata Agus, Kota Gudeg berkembang menjadi kota yang semakin padat dengan penduduk dan permukiman. Pun semakin menjamurnya gedung-gedung dan fasilitas umum lainnya. Kondisi itu meningkatkan kerentanan kota terhadap kebakaran.

Oleh karenanya perluantisipasi bencana kebakaran, termasuk aturan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam Raperda kata dia

akan diatur mengenai berbagai aspek, mulai dari kewenangan kelembagaan, peran masyarakat dan dunia usaha termasuk mengenai prosedur standar antisipasi dan penanganan kebakaran, pendanaan, manajemen kebakaran di permukiman dan fasilitas umum.

Ia menyebut kewenangan pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat namun juga harus memberikan fungsi membuat regulasi. "Salah satu bentuk aspek represif adalah adanya kewajiban pemilik gedung

swasta untuk menerapkan SOP mengenai antisipasi bencana kebakaran," kata Agus.

Saat ini Raperda tersebut sedang disusun, untuk selanjutnya diusulkan masuk pembahasan tahun ini. Jika hal tersebut tidak terkejar maka akan dimasukkan tahun depan. Dalam rencana umum pengadaan 2014, untuk konsultasi penyusunan Raperda tersebut dianggarkan dana sebesar Rp 300 juta.

Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yog-

akarta, Suwanto menyebutkan pihaknya mendukung Raperda tersebut. Dengan adanya Raperda mengenai kebakaran diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana kebakaran termasuk antisipasinya.

"Prinsip kami, jika Raperda itu menguntungkan masyarakat akan kami dukung, namun kami masih menunggu drafnya dulu dan harus menunggu anggota dewan yang baru," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.(dnh)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. BPBD | | | |

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005